

Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Penegakan Hukum

Mikha Sevti Cantika¹, Naiya Ananda², Putri Dewi Herliza³ Perawati⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Riau

E-mail: mikha.sevti3730@student.unri.ac.id¹, naiya.ananda3535@student.unri.ac.id²,
putri.dewiharliza4073@student.unri.ac.id³, perawati@lecturer.unri.ac.id⁴

Article History:

Received: 22 November 2024

Revised: 07 Desember 2024

Accepted: 09 Desember 2024

Keywords: *Penggunaan Bahasa Indonesia, Penegakan, Hukum*

Abstract: *Artikel ini membahas bagaimana Bahasa Indonesia berfungsi dalam penegakan hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dalam proses hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada pemahaman dan aksesibilitas hukum di masyarakat. Metode yang digunakan termasuk penelitian literatur dan analisis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan tepat sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Penegakan hukum di Indonesia lebih efektif jika orang menguasai bahasa.*

PENDAHULUAN

UUD 1945 bab 15 pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Wahyuni, 2018). Bahasa adalah alat penting untuk komunikasi manusia. Pada dasarnya, setiap orang harus bisa berbicara satu sama lain dan memiliki pemikiran yang sama. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam proses penegakan hukum, tetapi juga digunakan untuk menciptakan dan menginterpretasikan standar yang mengatur masyarakat. Pemerintah menetapkan aturan untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta mengatur perilaku orang. Ini dikenal sebagai hukum sendiri.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (Anggraeni, 2022).

Bahasa dan hukum selalu terkait. Sangat mungkin bahwa pemahaman bahasa yang digunakan dalam bidang hukum memiliki korelasi langsung dengan interpretasi hukum yang digunakan dalam praktik hukum Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan oleh praktisi hukum pada umumnya. Makna hukum, baik dalam arti konsep dan praktik hukum

ditentukan oleh bahasa hukum. Bahasa hukum sangat bergantung pada orang yang menggunakannya, terutama praktisi hukum. Proses legislatif, termasuk pembuatan undang-undang, sangat bergantung pada bahasa yang digunakan. Kesalahan bahasa dapat menyebabkan ambiguitas dan ketidakpahaman, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam proses membuat, menegakkan, memproses, dan menjalankan hukum di Indonesia.

Keragaman bahasa hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bahasa Indonesia hidup sebagai bahasa resmi dan juga sebagai bahasa hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan fungsi-fungsi yang diatur dalam undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam bidang hukum atau putusan hukum sering terdengar memiliki bahasanya sendiri, seakan-akan bidang hukum memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Padahal, perihal tersebut adalah bahasa Indonesia yang kaidah kalimat, ejaan, kosakata, dan tata tulisnya tidak berbeda sama sekali dari kaidah yang digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya. Bahasa yang diterapkan pada bidang tertentu seperti disebutkan bahasa hukum itu disebut laras atau registered (Asista & Suntara, 2024).

Menurut (Riana & Junaidi, 2017) penggunaan tata bahasa baku Indonesia memiliki peranan penting dalam upayanya mengungkap ekseistensi hukum. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Sejalan dengan penelitian ini, (Sarah & Hindun, 2022) mengungkapkan bahwa di Indonesia, masih banyak sekali kasus kasus yang terjadi mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang belum tepat dalam penyelesaian kasus, misalnya pada kata paten yang memiliki arti ganda atau gratifikasi yang mana memiliki arti uang yang diberikan dengan ketulusan atau uang yang diberikan untuk proses suap, tentu hal ini menghasilkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam hal ini diperlukan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Mahadi (dalam Shanty, 2016) juga mengatakan hal yang serupa bahwa permasalahan yang timbul adalah, keadaan dan pemakaian bahasa Indonesia di bidang hukum belum menunjukkan suatu kemantapan. Selain itu penggunaan istilah atau ungkapan-ungkapan hukum yang tidak sama/tidak seragam menimbulkan berbagai penafsiran para ahli hukum mengenai suatu ketentuan hukum, baik yang menyangkut bidang peraturan-peraturan maupun bidang perintahperintah dan larangan-larangan yang sering menimbulkan akibat yang merugikan.

LANDASAN TEORI

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bias menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang dapat berfungsi dalam berbagai keperluan. Bahasa Indonesia adalah unsure penting serta media komunikasi utama bagi masyarakat Indonesia. Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang berarti keeksistensian bahasa Indonesia sangat bergantung pada tingkat keberhasilan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia ini, misalnya menciptakan kosa kata dan istilah-istilah baru, baik itu berupa penyerapan kosa kata bahasa daerah atau pun bahasa asing semakin ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu

.....

pengetahuan dan teknologi. Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global, terutama teknologi informasi sangat cepat (Febrianti, 2021).

Sebagai bahasa yang memiliki fungsi dasar sejak pendiriannya. Adanya fungsi membuat bahasa Indonesia tumbuh besar dan dikenal oleh negara lain. Bahasa Indonesia berfungsi dasar sebagai (1)alat pemersatu, (2)sebagai penghubung antar masyarakat berbeda daerah, (3)identitas/tanda pengenal bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mempersatukan bangsa. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia (Desmirasari & Oktavia, 2022).

Bahasa Hukum

Menurut (Ermalinda, 2023) “bahasa hukum” itu adalah Bahasa Indonesia yang memiliki kaidah kalimat, bentuk kata, kosakata, dan tata tulisannya tidak berbeda sama sekali dari kaidah yang berlaku pada Bahasa Indonesia umumnya, yang membedakan adalah bahasa yang dipakai di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah, kosakata tertentu, dan gaya penyampaian yang sesuai dengan keperluan dan kelaziman yang berlaku di bidang itu. Model bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu itu disebut laras (*registre*).

Bahasa Hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat ektetika bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang diperlukan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bahasa Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbolsymbol hukum baik dalam lalulintas bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*), maupun dalam bahasa pergaulan (*omgangastaal*) (Sugiarto, 2020). Penggunaan bahasa yang tidak teratur dan tidak tepat tentu saja akan menyulitkan pendengar serta pembaca untuk dapat saling berkomunikasi. Keteraturan dan ketepatan dalam berbahasa pasti akan memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang sangat luas dan mendalam mengenai ilmu kebahasaan.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat diirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran nmemulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali (Candra & Sinaga, 2023).

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo (dalam Setiadi, 2018), terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*). Indikator yang yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto (dalam Sudjana, 2020) adalah faktor hukumnya; penegak hukum; fasilitas; warga masyarakat; dan budaya.

METODE PENELITIAN

Metode utama dalam penyajian data penelitian ini adalah tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa Indonesia dan bahasa hukum Indonesia serta bahan lain yang bersumber dari internet, terkait dengan pengaruh bahasa Indonesia terhadap penegakan hukum. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh, penulis dapat menemukan pola, tren, dan pandangan yang berbeda. Selain itu, penulis dapat memperoleh pemahaman yang signifikan tentang peran bahasa Indonesia dalam proses penegakan hukum di Indonesia karena teknik ini membantu penulis dalam membangun argumen dan hipotesis yang kuat berdasarkan bukti yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan suatu keharusan bagi rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia baku memiliki sifat kemantapan dinamis, yang berupa kaidah dan aturan tetap (Ramaniyar et al., 2019). Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar (Madina, 2019).

Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia sangat penting untuk semua aspek kehidupan internasional dan untuk menegakkan hukum. Sangat penting untuk memahami dan menggunakan bahasa yang jelas dalam konteks ini untuk memastikan bahwa hukum dipahami dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat umum. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap hukum dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan. Lebih jauh, penting untuk memahami bagaimana bahasa Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai bahasa untuk menyampaikan pemahaman yang baik terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Peran Bahasa Indonesia Dalam Proses Hukum

Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama untuk menyusun dokumen hukum dan untuk berinteraksi dengan masyarakat umum, bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam proses hukum di Indonesia. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia untuk memandu tindakan masyarakat dan memberikan arahan kepada mereka yang menegakkan hukum. Selain itu, hukum menjamin hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sehingga setiap orang memiliki perlindungan hukum yang sama. Selain itu, bahasa yang jelas dan tepat yang digunakan dalam dokumen hukum membuat orang lebih memahami hukum, yang membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.

Dokumen yang berkaitan dengan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dalam bahasa yang mudah dipahami mendorong orang untuk mengikuti aturan yang berlaku. Dalam dokumen hukum, penggunaan bahasa Indonesia haruslah cermat agar jelas, konsisten, dan akurat. Hal ini dilakukan agar penafsiran hukum yang diinginkan dapat tersampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hal ini sejalan dengan Fuady, A. R. dkk. yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam mengkaji dokumen hukum. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai komponen penting dalam proses penetapan standar hukum dan etika. Kualitas bahasa yang digunakan akan memengaruhi penegakan hukum dan pencapaian tujuan.

Kendala Ambiguitas Dalam Bahasa Hukum

Undang-undang merupakan salah satu jenis hukum tertulis. Oleh karena menggunakan bahasa untuk menjelaskan hukum, maka bahasa yang digunakan dalam undang-undang harus jelas dan baik agar dapat menjelaskan hukum secara mudah dipahami dan lugas. Tujuan undang-undang sebagai komunikasi hukum tertulis tidak akan tercapai jika terjadi ambiguitas atau ketidakjelasan dalam proses penyusunan undang-undang.

Hal ini dikarenakan penafsiran yang berbeda terhadap undang-undang yang sama dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda pula terhadap undang-undang yang sama. Penggunaan istilah "barang siapa" dalam konteks hukum pidana merupakan contoh ambiguitas yang sering muncul; hal ini dapat memengaruhi semua individu atau hanya sekelompok orang tertentu, tergantung pada konteks kalimat yang mendukungnya. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kejelasan dalam proses hukum. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan putus asa di antara semua pihak yang terlibat

Oleh karena itu, sangat penting bagi praktik dan pendidikan untuk memahami hukum dengan baik sehingga mereka dapat membuat definisi dan konteks yang lebih jelas untuk berbagai klausul. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa "barang siapa" tidak mengarah pada interpretasi yang berbeda dan menghasilkan dokumen hukum yang sah sekaligus mengurangi kemungkinan ambiguitas yang dapat merusak hasilnya.

Bahasa Sebagai Kunci Akses Keadilan

Bahasa hukum adalah alat penting untuk berkomunikasi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Untuk berfungsi dengan baik dalam produk hukum seperti peraturan perundang-undang, gugatan, dan putusan pengadilan, Wika Yudha Shanty mengatakan bahwa bahasa hukum Indonesia harus bebas dari ambiguitas dan multitafsir. Bahasa hukum yang jelas membantu aparat penegak hukum menerapkan hukum dengan adil dan konsisten.

Kemahiran bahasa hukum sangat penting untuk komunikasi guna memastikan kepatuhan dan kepatuhan hukum. Senada dengan Julaidin menegaskan bahwa akses terhadap informasi merupakan hak yang diberikan kepada seluruh warga negara oleh UUD 1945. Sangat penting untuk menjelaskan hukum dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang, masyarakat umum. Jika hukum tidak dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami.

Bahasa yang baik mencegah ketidakadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan menciptakan masyarakat yang percaya pada sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang dijamin oleh hukum Indonesia, kualitas bahasa hukum harus ditingkatkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan keseragaman dalam penyusunan aturan hukum, memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efektif antara pihak-pihak terkait, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dengan perbendaharaan kata yang mencakup unsur budaya dan adat istiadat dari berbagai daerah, Bahasa Indonesia berperan dalam menjembatani keberagaman sehingga mendukung pelaksanaan hukum yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, H. Y. (2022). Implementasi Asas Kepastian Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah Berdasarkan Uu Bendera Dan Bahasa Dikaitkan Dengan Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1039>
- Asista, A., & Suntara, R. A. (2024). Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laras Hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 17(1), 69–82. <https://doi.org/10.30651/st.v17i1.20970>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Desmirasari, R., & Oktavia, Y. (2022). Pentingnya Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi. *ALINEA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 2(1), 114–119. <https://doi.org/10.58218/alinea.v2i1.172>
- Ermalinda, J. (2023). Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang (Studi Penggunaan Bahasa Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(02).
- Febrianti, Y. F. (2021). Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 43–48. <https://doi.org/10.32696/jip.v2i1.752>
- Madina, L. O. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Berkomunikasi. *Journal of Dedication to Papua Community*, 2(2). <https://doi.org/10.34124/jpkm.v2i2.47>
- Ramaniyar, E., Alimin, A. A., & Hariyadi, H. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Artikel Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 8(1), 34. <https://doi.org/10.31571/bahasa.v8i1.1132>
- Riana, R., & Junaidi, M. (2017). Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*.
- Sarah, P., & Hindun, H. (2022). Pemakaian Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Penyelesaian Kasus Persidangan Perdata. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 11(2), 89–100. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v11i2.6727>
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917>
- Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 89–110. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925>
- Sugiarto, S. (2020). Urgensi Bahasa Indonesia dalam Ilmu Hukum. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas*.
- Wahyuni, N. (2018). Analisis Dasar Hukum Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.91>
-